

Judul : Parpol tak mau kaderisasi diawasi lembaga eksternal
Tanggal : Kamis, 30 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Parpol Tak Mau Kaderisasi Diawasi Lembaga Eksternal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik (parpol). Namun, pihak parpol menolak usulan tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, usulan ini muncul dari hasil kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola partai politik yang dilakukan lembaga.

Kaderisasi, pendidikan politik, serta pengelolaan keuangan partai memperbesar risiko penyimpangan," ujar Budi, di Jakarta, Sabtu (25/04/2026). Ia juga menyoroti belum adanya standarisasi pelaporan keuangan partai yang berdampak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Sebelumnya, KPK melalui Direktorat Monitoring pada 2025 telah melakukan kajian terkait pencegahan korupsi dalam tata

kelola partai politik. Dari kajian tersebut, ditemukan bahwa proses kaderisasi partai belum berjalan optimal. Hal ini antara lain terlihat dari adanya biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi kader hingga dicalonkan dalam pemilihan umum. Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPK mengusulkan perbaikan sistem kaderisasi guna menekan biaya politik sekaligus mencegah praktik "pengembalian modal" oleh

kader yang telah mengeluarkan biaya besar. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus setuju dengan usulan ini, la menilai pembentukan lembaga pengawas kaderisasi dapat menjadi langkah positif mengingat banyaknya kasus korupsi di tingkat pusat maupun daerah. "Saya kira usulan itu baik-baik saja," ujarnya. Namun, pihak parpol menolak usulan ini. Wakil Ketua Komisi

II DPR Zulfikar Arse Sadikin menganggap, parpol tak perlu lembaga pengawas eksternal. "Kebutuhan partai bukanlah lembaga pengawas pengkaderan, melainkan memahami akar masalah dan kebutuhan internal partai itu sendiri," ujar politisi Partai Golkar ini. Untuk mengulas lebih jauh pandangan Lucius Karus dan Zulfikar Arse Sadikin terkait usulan tersebut, berikut petikan wawancaranya:

LUCIUS KARUS, Peneliti Formappi
Positif, Untuk Cegah Kader Partai Korupsi



“Jika ingin membentuk lembaga tersebut, salah satu kuncinya adalah revisi Undang-Undang Partai Politik. Semua pihak perlu mendorong revisi ini.”

Bagaimana pandangan Anda mengenai usulan KPK untuk membentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai Politik?
Sebagai sebuah usulan, tentu itu sah saja. Kemungkinan besar, gagasan dari KPK muncul karena banyaknya kasus korupsi di level nasional.

Artinya perlu ada pembenahan?
Ya, memang banyak hal yang harus dibenahi di partai politik.

Apakah termasuk sistem kaderisasi?
Salah satunya adalah proses kaderisasi di partai politik. Kami melihat kaderisasi ini tidak pernah digarap secara serius oleh parpol. Akibatnya, banyak kader yang tidak memiliki ideologi yang jelas.

Bisa dijelaskan lebih lanjut?
Contohnya, banyak kader yang be-

has keluar masuk partai politik atau berpindah-pindah. Kondisi ini membuat mereka rentan terjebak dalam praktik korupsi. Saat ini, kaderisasi di partai politik cenderung hanya bersifat administratif. Ikatan antara partai dan kadernya sebatas tercatat sebagai anggota, tanpa pembinaan yang kuat.

Selain itu, apa catatan Anda jika Lembaga Pengawas Kaderisasi ini terwujud?
Jika KPK ingin membentuk lembaga tersebut, salah satu kuncinya adalah revisi Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol). Semua pihak perlu mendorong revisi ini. Tanpa revisi UU Parpol, akan sulit mengusulkan perbaikan mendasar, termasuk dalam sistem kaderisasi.

Apakah KPK sebaiknya mendorong revisi UU Parpol?

Ya. Jika KPK ingin memperbaiki partai politik, maka perlu meredesak revisi UU Parpol. Setelah itu, KPK bisa menyampaikan gagasan-gagasan penting dalam pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan parpol.

Apa konsekuensinya jika tidak ada revisi?
Prinsipnya, pembenahan partai politik sangat bergantung pada revisi regulasi. Tanpa itu, reformasi tata kelola partai bisa terhambat.

Jika KPK tidak mendorong revisi, bagaimana Anda melihatnya?
Hal itu bisa menimbulkan kesan bahwa KPK hanya berupaya memelanaikan diri dari kritik terkait melemahnya pemberantasan korupsi di tingkat pusat. Bahkan, hal itu juga bisa dianggap sebagai bentuk ketidakberdayaan KPK dalam memberantas korupsi. ■ **REN**

ZULFIKAR ARSE SADIKIN, Wakil Ketua Komisi II DPR
Lembaga Ini Tidak Bisa Menjawab Persoalan Partai



“Pelaku korupsi tidak hanya berasal dari partai politik, jadi pendekatannya tidak bisa disederhanakan hanya dengan membentuk lembaga pengawas.”

KPK mengusulkan pembentukan Lembaga Pengawas Pengkaderan Partai Politik. Apakah Anda se-pakat dengan usulan tersebut?
Saya kurang sependapat. Menurut saya, tidak perlu ada Lembaga Pengawas Pengkaderan Partai Politik.

Jadi Anda tidak setuju dengan usulan tersebut?
Ya, saya tidak setuju.

Apa alasannya?
Karena keberadaan lembaga pengawas seperti itu tidak akan menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di partai politik. Kebutuhan partai bukanlah Lembaga Pengawas Pengkaderan, melainkan memahami akar masalah dan kebutuhan internal partai itu sendiri. Kita perlu meng-gali problem yang sesungguhnya, agar bisa merumuskan solusi yang tepat. Selain itu, pelaku korupsi tidak

hanya berasal dari partai politik, jadi pendekatannya tidak bisa disederhanakan hanya dengan membentuk lembaga pengawas.

Lalu, apa problem utama partai politik di Indonesia?
Saat ini, partai politik belum sepenuhnya menjadi institusi publik yang sesungguhnya. Belum ada tekad yang kuat untuk menjadikan partai sebagai agen transformasi dan agen pembangunan.

Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?
Perlu ada perubahan Undang-Undang Partai Politik yang mengarah pada penguatan peran partai sebagai institusi publik, agen demokrasi, dan agen transformasi.

Apa saran konkret Anda?
Buatlah Undang-Undang Partai

politik yang berorientasi pada pencegahan korupsi. Selain itu, publik juga harus ikut bertanggung jawab, salah satunya melalui peningkatan dana publik bagi partai politik, misalnya hingga 50 persen dari negara. Namun, pertanggungjawabannya harus lebih baik dan tegas. Jika ada partai yang terlibat korupsi, harus ada sanksi tegas, bahkan sampai pada pembubaran partai.

Bagaimana dengan kaderisasi di Partai Golkar?

Sejauh ini cukup baik, dan tentu ingin terus kami tingkatkan. Di Golkar ada Akademi Golkar yang menjadi sarana untuk menghasilkan kader yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Kami juga tidak mengandalkan figur semata, melainkan sistem dan nilai. Selain itu, tidak ada jabatan yang dipegang lebih dari dua periode di Partai Golkar. ■ **REN**